

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa masyarakat yang tinggal di daerah desa perkotaan atau desa urban masih memiliki partisipasi dalam penganggaran. Masyarakat ikut berpartisipasi baik dalam proses perencanaan, pelaksanaan program dan proyek, menikmati hasil, dan dalam proses evaluasi setelah semua proses dijalankan. Masyarakat tetap mau ikut bergotong royong dan melakukan swadaya dalam mensukseskan program-program yang ada seperti masyarakat di daerah pedesaan. Bentuk partisipasi masyarakat beragam di daerah desa Sinduharjo, dan pemerintah desa Sinduharjo mengakomodir segala bentuk partisipasi masyarakatnya. Dampak pandemi *COVID 19* ini berpengaruh terhadap program-program yang sudah direncanakan dan membuat program-program yang ada tertunda atau belum dilaksanakan. Permasalahan yang terjadi selama proses partisipasi masyarakat jarang terjadi dikarenakan di desa Sinduharjo program atau proyek yang dibentuk oleh desa yang menggunakan dana desa bersumber dari aspirasi masyarakat dan pemerintah desa selalu mengajak partisipasi masyarakat, sehingga masyarakat cenderung selalu menerima hal yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dugaan awal peneliti bahwa masyarakat perkotaan cenderung apatis dan tidak mau berpartisipasi hampir tidak ditemukan dalam penelitian ini. Peneliti awalnya menduga sebagian besar masyarakat yang menjadi populasi dalam penelitian ini

tidak berkeinginan untuk ikut berpartisipasi dalam penganggaran menggunakan dana desa seperti dalam penelitian yang dilakukan Santoso et al (2018). Namun, dari hasil penelitian ini masyarakat sebagian besar masih mau berpartisipasi secara aktif dalam semua tahapan penganggaran. Peneliti hanya menemukan 1 RW saja yang tidak ikut aktif dalam partisipasi ini dikarenakan masyarakatnya merasa sudah berkecukupan secara finansial. Dana desa yang sejak awal ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara langsung lewat program-program yang dibiayai oleh dana desa sangat bermanfaat dan diterima masyarakat di desa Sinduharjo. Hal ini terbukti dengan masyarakat selalu merasa positif ketika dana desa digunakan untuk menjalankan program yang sudah disusun. Oleh karena itu masyarakat terdorong untuk ikut berperan aktif dalam proses penganggaran dana desa ini dikarenakan masyarakat sadar bahwa hasil akhir dari penggunaan dana desa pada akhirnya akan tertuju kepada masyarakat langsung.

Dari penelitian ini, peneliti dapat membandingkan bentuk partisipasi masyarakat di desa Sinduharjo yang merupakan desa di daerah perkotaan dengan desa lain yang masih memegang teguh adat istiadat dan kearifan lokal seperti desa di daerah Tengger yang diteliti oleh Sopanah (2013). Peneliti menemukan perbedaan dimana masyarakat perkotaan cenderung lebih mempercayakan aspirasi dan suaranya melalui wakilnya terutama dalam perencanaan dan evaluasi. Masyarakat dengan adat yang masih kuat seperti masyarakat Tengger cenderung menggunakan adat dan partisipasi langsung segenap masyarakat yang ada selama proses penganggaran ataupun proses kegiatan program atau proyek

yang berlangsung. Masyarakat perkotaan cenderung tidak memiliki adat yang mengakar di masyarakatnya sehingga partisipasi di daerah perkotaan cenderung berdasarkan sistem yang ada dan melalui jalur formal, tidak seperti masyarakat di pedesaan yang memiliki kearifan lokal yang kuat dimana partisipasi masih berlangsung organik dan masih ada partisipasi secara informal.

5.2.Keterbatasan Penelitian

Selama penelitian berlangsung, terdapat beberapa keterbatasan yang terjadi dan dialami peneliti. Beberapa keterbatasan yang ditemui peneliti yaitu:

1. Penelitian ini dilakukan selama pandemi *COVID-19* yang masih terjadi sampai penelitian ini dilakukan. Hal ini menyebabkan penelitian ini tidak bisa dilakukan secara menyeluruh diakibatkan keadaan yang belum memungkinkan untuk melakukan penelitian secara lama.
2. Dikarenakan oleh pandemi, peneliti tidak bisa melakukan observasi secara langsung kegiatan warga, baik musyawarah maupun pelaksanaan program dikarenakan selama pandemi tidak ada kegiatan yang melibatkan banyak warga. Peneliti tidak bisa melakukan observasi di kantor desa dikarenakan tidak adanya kegiatan yang memerlukan partisipasi warga.
3. Penelitian ini menggunakan wawancara saja sebagai data primer. Hal ini bisa mengakibatkan bias terhadap data yang diperoleh oleh peneliti. Hasil penelitian ini juga dipengaruhi oleh keadaan informan dalam menjawab pertanyaan wawancara. Dalam hal ini beberapa informan tidak memberikan informasi secara menyeluruh dan ada informan yang

memberikan data yang berbeda. Perbedaan ini dimungkinkan karena perbedaan persepsi antara informan, pandangan informan yang berbeda, dan pengalaman informan selama ini berbeda-beda.

4. Dikarenakan tidak adanya observasi secara langsung, peneliti menganggap penelitian ini kurang bisa memberikan gambaran secara langsung mengenai partisipasi warga masyarakat dikarenakan masa pandemi yang masih berlangsung.

5.3.Saran

Berdasarkan apa yang peneliti dapatkan dari penelitian ini dan dari hasil wawancara yang ada, peneliti memberikan saran-saran terhadap pihak terkait. Adapun saran-saran tersebut yaitu:

- 1) Bagi pihak pemerintah di desa Sinduharjo
 - 1) Dari apa yang peneliti dapatkan, sebaiknya pihak desa Sinduharjo lebih mengajak wakil-wakil dari pihak masyarakat di lapisan bawah seperti RT atau RW untuk memberikan masukan kepada pihak desa. Karena dengan adanya suara dari wakil masyarakat yang menyentuh masyarakat langsung diharapkan dapat memberikan partisipasi warga secara langsung.
 - 2) Dari pengamatan peneliti, sebaiknya pihak desa Sinduharjo lebih memaksimalkan *website* resmi dari desa Sinduharjo. Dengan kemajuan teknologi yang ada jika *website* resmi pemerintah dikelola dengan baik dan memberikan informasi yang *up-to-date* dari program-program pemerintah desa Sinduharjo, masyarakat bisa

langsung mengawasi dan bisa memberikan umpan balik secara langsung.

2) Bagi pihak pemerintah di Pedukuhan dan RW

1) Peneliti melihat ada ketidak sinkronan pada pernyataan dari pihak RW dan pedukuhan. Peneliti menyarankan untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama antara pihak RW dan pedukuhan sehingga memperkecil adanya perbedaan informasi dan pendapat di satu pedukuhan.

2) Peneliti menemukan pihak pedukuhan tidak terlalu mengenal warganya dengan menemukan bahwa pihak pedukuhan mengatakan warganya lebih sering hanya menerima hasil, padahal di dalam wawancara dengan pihak RW ternyata tidak. Peneliti menyarankan pihak pedukuhan untuk melihat dan meminta laporan dari pihak RW partisipasi warga masyarakat yang sebenarnya aktif, agar pihak pedukuhan tidak menyamaratakan seluruh warga pedukuhan berpartisipasi secara pasif.

3) Pihak RW sebaiknya lebih bersinergi dan mempercayai pihak pedukuhan. Peneliti menemukan adanya beberapa pihak yang sedikit tidak nyaman dengan kerja sama yang dibangun dengan pihak pedukuhan. Saran dari peneliti karena pihak pedukuhan dan RW merupakan pihak yang paling sering dan dekat dengan masyarakat kerja sama harus lebih terawat dan diperhatikan oleh semua pihak.

3) Bagi pihak peneliti selanjutnya

- 1) Dikarenakan keterbatasan penelitian akibat masa pandemi, peneliti menyarankan agar penelitian selanjutnya juga dilakukan observasi kegiatan oleh warga sekitar. Dengan adanya observasi penelitian bisa lebih menangkap partisipasi masyarakat secara langsung.
- 2) Dikarenakan penelitian ini hanya melihat bentuk partisipasi warga masyarakat di dua pedukuhan, penelitian ini tidak bisa menggeneralisasi apa yang terjadi di satu desa. Peneliti menyarankan untuk melakukan penelitian kepada sampel yang lebih banyak agar perbedaan dan bentuk partisipasi warga benar-benar terlihat.
- 3) Penelitian ini hanya membandingkan masyarakat perkotaan di desa Sinduharjo dengan masyarakat di desa Tengger, sehingga dimungkinkan adanya bias dari hasil penelitian. Penelitian selanjutnya bisa dilakukan dengan membandingkan lebih banyak desa yang memiliki corak berbeda dengan desa di daerah perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fikri, A., Sudarma, M., Sukohatsono, E.G., Purnomosidhi, B., (2010). STUDI FENOMENOLOGI AKUNTABILITAS NON GOVERNMENTAL ORGANIZATION. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Vol. 1 No. 3 Desember 2010*
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta, Indonesia: BPFE UGM
- Jamaludin, A.N., (2017). *SOSIOLOGI PERKOTAAN: Memahami Masyarakat Kota dan Problematikanya*. Bandung, Indonesia: CV. Pustaka Setia
- Kurniawan, C.W., (2016). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN INFRASTRUKTUR BERSUMBER DANA DESA DI DESA TRISOBO KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL*. Unpublished Manuscript, Universitas Negeri Semarang, Jawa Tengah.
- Mastawati, R., (2017). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG KEGIATAN PARIWISATA DI DESA PANDANSARI KABUPATEN BATANG*. Unpublised Manuscript, Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, Jawa Barat.
- Miles, B.M., dan Huberman, M., (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta, Indonesia: UIP
- Moleong, L.J., (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung, Indonesia: PT. Remaja Rosdakarya

- Santoso, E.B., Moenek, R. (2018). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI KOTA BALIKPAPAN. *JURNAL ILMIAH WAHANA BHAKTI PRAJA* Vol. 8, No. 2, Desember 2018: 97 – 112
- Sopannah, A. (2013). *DIBALIK CEREMONIAL BUDGETING “REMBUG DESA TENGGER” PARTISIPASI NYATA DALAM PEMBANGUNAN*. Unpublished Manuscript, Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur
- Sopannah, A., Sudarna, M., Ludigdo, U., dan Djamhuri, A. (2013). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENGANGGARAN DAERAH BERBASIS KEARIFAN LOKAL (Studi Pada Masyarakat Suku Tengger Pegunungan Bromo Jawa Timur)*. Unpublished Manuscript, Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur
- Sudiby, R.P., (2006). PARTISIPASI MASYARAKAT SUB URBAN DALAM PEMBANGUNAN KOTA MALANG. *HUMANITY, Volume 1, Nomor 2, Maret 2006: 76 -86*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Tumbel, S.M., (2017). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TUMALUNTUNG SATU KECAMATAN TARERAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN*. Unpublished Manuscript, Universitas Sam Ratulangi, Sulawesi Utara

DAFTAR *LINK WEBSITE*

<https://www.berdesa.com/definisi-desa-menurut-berbagai-ahli/>

(diakses pada tanggal 20 September 2020)

<https://sinduharjo.slemankab.go.id/>

(diakses pada tanggal 1 September 2020)

<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-261.pdf>

(diakses pada tanggal 12 Oktober 2021)

<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/60TAHUN2014PP.HTM>

(diakses pada tanggal 13 Oktober 2021)



LAMPIRAN

Daftar Pertanyaan

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?
3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?
4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?
5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?
6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?
7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?
8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?
9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?
10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?
12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?
13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?
14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?
15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?
16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

Transkrip Wawancara

Dengan Bapak Sudarja, Kepala Desa Sinduharjo

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Ada. Setiap tahun ada. Biasanya disini di kantor disini, tapi jika melibatkan warga nanti dari desa akan mengirim perangkat dan tokoh masyarakat ke bawah. Jadi nanti ada tim sendiri.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Ya kita memprogramkan proyek-proyek itu jika menyangkut masyarakat maka masyarakat akan terlibat langsung. Selama pandemi ini hanya kegiatan yang dilakukan untuk penanggulangan pandemi.”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Hanya perwakilan, terutama di masa pandemi ini tidak ada kumpul-kumpul. Nanti perwakilan disini akan menyampaikan pendapat, tapi jika wakil disini kurang menguasai akan dikirimkan tim untuk terjun ke bawah.”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Aspirasi selalu ada, karena kita membuat RPJM untuk 6 tahun. Dari RPJM itu dimulai dari MusDuk atau musyawarah di pedukuhan yang diikuti berbagai tokoh untuk membahas permasalahan di masing-masing

pedukuhan, dan nanti akan dicari solusinya dan solusi itu nanti menjadi program di desa untuk menjadi RPJM yang dibagi dalam jangka pendek dan jangka menengah.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

“Saya kira selalu menggunakan musyawarah terutama karena sekarang ada BPK, lalu Linmas, PKK, Karang Taruna. Dari musyawarah itu jangan sampai ada program yang hilang atau terlambat.”

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

“Kebanyakan setuju karena aspirasi masyarakat berasal dari bawah dan desa hanya merangkum. Walaupun hanya dari wakil-wakil masyarakat dari bawah tapi desa sudah merangkum segala aspirasi yang ada.”

7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?

“Menggunakan Group WA mas biasanya. Selain pakai surat dan disampaikan langsung ke kepala dukuh masing-masing, terkadang jika ada program yang khusus dari desa sendiri akan membentuk tim khusus untuk turun ke bawah mensosialisasikan.”

8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

“Biasanya hanya perwakilan saja masyarakat.”

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?

“Dari desa ini terutama sistem pelaporan-pelaporan yang terkadang terlalu panjang dan ribet. Untuk akhir-akhir ini ada masalah di regulasi aturan, disatu sisi kita dikejar-kejar untuk menuntaskan program yang ada dari rancangan anggaran dan belanja, tapi-tiba ada regulasi baru dari atas yang terkait dengan penggunaan dana desa terutama untuk penanganan pandemi. Bisa dibilang ada ketidak sinkronisasi antara pihak desa dengan dinas diatas desa, seperti instruksi presiden baru-baru ini. Terkadang dari atas tidak ada sosialisasi sehingga rencana yang sudah disusun bermasalah ketika ada aturan baru.”

10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

“Termasuk aktif disini. Tetapi karena dana desa selama 2 tahun ini hampir habis karena untuk pandemi dimana dana benar-benar hanya untuk penanganan dan penanggulangan pandemi sehingga belum ada proyek-proyek desa yang berjalan lagi.”

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?

“Ya saya kira banyak positifnya terutama sebelum ada *COVID* ini karena mengangkat ekonomi masyarakat lewat pemberdayaan dan program infrastruktur yang dilaksanakan.”

12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

“Manfaatnya banyak, seperti jalan jika bagus dan lancar akan mempermudah akses masyarakat dan membuat bisnis masyarakat meningkat dan menambah nilai perekonomian masyarakat. Apalagi jika di wilayah selatan yang sudah urban.”

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

“Untuk kontrolnya langsung masyarakat, tapi juga dari RT/RW, Pak Dukuh, ada sub unit LPMD, dan sebagainya. Ketika pelaksanaan warga juga dilibatkan untuk mengawasi jika tidak sesuai dengan rencana awal. Juga ada tim tersendiri yang mencakup masyarakat untuk mengontrol di sini.”

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

“Untuk monitoring masyarakat biasanya lewat pak dukuh, lalu nanti dibawa ke kantor desa dan biasanya setiap hari Rabu 2 minggu sekali atau jika memang penting sebelum hari Rabu akan dikoordinasikan di kantor desa, sehingga laporan dari masyarakat dari urusan awal sampai akhir program sampai ke kantor desa. Dan kantor desa juga selalu bekerja sama dengan kepala dukuh masing-masing, melewati protokol yang ada.”

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

“Tidak ada perasaan saya mas. Karena sudah melalui satuan group yang menampung dan menanggapi kritik dan saran yang ada.”

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

“Kita cek dulu mas, jika memang dari desa merasa harus turun ke bawah, kita akan mengirimkan tim tersendiri untuk mengecek. Dan tim itu nanti yang akan mengkoordinasikan dengan kantor desa dan menanggapi kritik dan saran tersebut.”



Transkrip Wawancara

Dengan Bapak Faishal, Sekretaris/Carik Desa Sinduharjo

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Jadi untuk musyawarah desa yang menjadi kewajiban di desa itu setahun sekali itu MusDes untuk penyusunan APBDes, tapi untuk kegiatan-kegiatan lain yang digunakan untuk masyarakat biasanya juga ada musyawarahnya sendiri. Dan biasanya MusDes itu dilaksanakan sebelum 30 Juni tahun sebelumnya untuk perencanaan tahun selanjutnya.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Masyarakat diberikan hak penuh asalkan sesuai dengan RPJMDes, RPJMKab, dan RPJM Provinsi. Dan dalam pelaksanaan penyusunan APBDes semua sumber dana di desa termasuk dana desa juga dibahas dan diperhitungkan”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Biasanya cuma perwakilan yang diundang, tapi warga dipersilahkan hadir jika berkeinginan untuk ikut. Tapi biasanya tetap wakil dari masyarakat dan tokoh yang hadir.”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Gagasan biasanya bertingkat mas. Sebelum acara MusDes, sudah ada musyawarah di tingkat pedukuhan untuk mengumpulkan ide, usulan, dan pendapat dari masyarakat dan nanti akan dibawa ke kantor desa saat MusDes.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

“Harapan kita ketika MusDes usulan datang dari masyarakat, jadi dari aparat desa tinggal merangkum dan nanti disesuaikan dengan RPJMDesa, RPJM Kabupaten, dan RPJM Provinsi.”

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

“Banyak yang setuju, walaupun ada kontra ketika MusDes biasanya akan diselesaikan saat itu juga, dan biasanya tidak ada voting dan selalu dicari *win-win solution* sehingga masyarakat selalu merasa diperhatikan.”

7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?

“Biasanya menggunakan baliho dimasing-masing pedukuhan dan di kantor desa, lalu sebelum pandemi ada juga buletin yang berisi kegiatan-kegiatan dari desa sinduharjo, tetapi sekarang hanya dari Group WA dan juga *website* Desa Sinduharjo.”

8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

“Biasanya hanya perwakilan saja mas.”

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?

“Kalau sudah dianggarkan biasanya tidak ada masalah, yang jadi masalah adalah ketika usulan banyak tapi dananya kurang. Jadi digunakan skala prioritas untuk menentukan program mana yang didahulukan.”

10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

“Biasanya yang paling kelihatan terutama ketika pembangunan fisik yaitu warga biasanya mau bergotong royong. Selain membantu fisik, warga juga berpartisipasi dengan membantu konsumsi dan jika bantuan dana dari masyarakat nanti diurus oleh pedukuhan masing-masing.”

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?

“Pengaruhnya jelas banyak dan semuanya positif terhadap masyarakat, seperti perbaikan jalan, pembinaan masyarakat dengan pemberdayaan yang nanti memberikan *skill* khusus kepada masyarakat.”

12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

“Selama ini untuk perbaikan jalan membuat akses warga lebih mudah, lalu saluran irigasi membantu warga petani dalam usaha pertaniannya.”

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

“Setiap kegiatan itu selalu ada timnya biasanya, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai nanti pengawasan hasil sudah ada timnya masing-masing sehingga resiko penyelewengan terhitung kecil. Dan juga untuk semua aset, desa Sinduharjo selalu mencatat mana yang rusak dan nanti akan dilakukan perbaikan.”

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

“Biasanya warga akan melapor dan jika ingin melaporkan ke kantor desa, perangkat desa akan melayani aduan warga yang datang. Juga dengan adanya laporan-laporan dan plakat yang tersedia disetiap program yang sedang berjalan, masyarakat bisa menghitung sendiri dan mengira-ngira apakah program itu benar sejak awal sampai akhir atau ada yang menyelewengkan. Juga biasanya pihak desa akan melakukan rapat evaluasi, disitu warga bisa melaporkan apa yang kurang atau masukan atau melaporkan adanya kesalahan dalam program yang ada, sehingga kedepannya bisa dilakukan perbaikan.”

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

“Rata-rata karena penyusunan MusDes dilaksanakan maksimal Juni tahun sebelumnya, terkadang ada hal-hal baru yang belum terjadi ketika penyusunan, masyarakat biasanya akan mengkritik kenapa hal-hal yang lebih penting seperti misalnya jalan rusak kenapa tidak diperbaiki. Jadi

kritik dari masyarakat datang terutama karena masyarakat tidak tahu penyusunan APBDes tidak selalu meng-*cover* hal-hal yang terjadi setelah MusDes.”

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

“Jika kritik dan saran terutama jika ada masalah baru dan membutuhkan respon yang cepat setelah MusDes, biasanya akan dilemparkan ke kabupaten. Jadi biasanya jika kritik dan saran yang berdasarkan masalah yang baru dan darurat akan dilemparkan ke kabupaten.”



Transkrip Wawancara

Dengan Bapak Eddy Indrayatna, Bendahara Desa Sinduharjo

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjangking aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Ada mas. Ya biasanya penjangkingan aspirasi bisa dilakukan dengan bermacam-macam cara seperti lewat pak dukuh, lewat BPD, LPMD. Tapi nanti ketika membuat APBDes akan menghadirkan semua *stakeholder* itu semua, sehingga semua masukan bisa diambil dari mereka nanti.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Keterlibatan masyarakat disini biasanya lewat atau melalui organisasi yang ada, dari organisasi yang ada nanti usulan untuk rencana penggunaan dana desa akan diambil dan akan diusahakan untuk diakomodir di pemerintah desa.”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Biasanya hanya diwakilkan dari kelompok warga atau masyarakat seperti pengurus-pengurusnya yang biasanya terlibat.”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Tentunya ada gagasan, tapi tidak semuanya diterima. Semuanya akan diskala prioritas mana yang lebih penting dan mana yang masih bisa

ditahan dulu terutama yang diutamakan yang mengenai hajat hidup orang banyak.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

“Masukan kita terima dahulu lalu dimusyawarahkan di desa, lalu diskala prioritas dan disamakan dengan dana yang ada dan dana yang diperlukan, bisa nanti diajukan ke kabupaten atau provinsi jika diperlukan dana yang lebih besar melebihi dana desa.”

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

“Karena musyawarah di desa ini selalu terbuka walaupun diwakilkan tapi masyarakat biasanya menerima, karena masyarakat bisa bertanya kepada wakil-wakilnya dari bawah yang diutus ke pemerintah desa, dan karena transparan masyarakat bisa selalu mengetahui keputusan yang diambil.”

7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?

“Di sini biasanya menggunakan baliho biasanya. Jadi masyarakat diberitahu keuangan desa dengan baliho, dari pendapatan desa termasuk dari dana desa, penggunaannya untuk apa saja terutama penggunaan dana desa, dan sebagainya. Karena ada 17 pedukuhan dibuatkan 17 baliho plus 1 untuk kantor desa. Lalu di website kadang di *upload*. Lalu group-group WA desa Sinduharjo. Disamping itu juga melalui BPD karena BPD lebih dekat dengan masyarakat bisa mensosialisasikan. Tapi yang utama sosialisasi disini biasanya melalui baliho.”

8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

“Kalau program yang menggunakan dana desa biasanya melalui termin-termin seperti menggunakan pak dukuh, nanti dukuh mensosialisasikannya di daerahnya masing-masing. Kalau di padukuhan biasanya semua masyarakat diundang, tapi tidak mesti semuanya datang.”

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?

“Sisi waktu, lalu iklim dan cuaca yang tidak pas. Seperti ketika dana desa kadang terlambat turun sehingga program-program yang sudah direncanakan terutama program pembangunan fisik biasanya terganggu. Jadi kendalanya seringnya jika dana desa terlambat turun.”

10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

“Biasanya kontribusi masyarakat hanya sekedar merawat saja, tapi kadang jika programnya seperti padat karya biasanya masyarakat juga ada yang ikut terjun membantu untuk melaksanakan program tersebut. Kontribusi ada dan biasanya bermacam-macam sih mas.”

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?

“Jarang ada yang kontra atau tidak senang, masyarakat seringnya menerima saja.”

12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

“Manfaatnya banyak mas. Jika ada program irigasi, warga petani bisa memanfaatkan dan menambah nilai ekonomi. Kalau ada program pelatihan-pelatihan yang mengedukasi masyarakat, masyarakat merasakan manfaatnya.”

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

“Kalau desa biasanya mengontrol hanya melalui pak carik, lalu naik ke pak lurah, BPD, dan terakhir masyarakat. Jika menggunakan dana desa, pak carik akan memverifikasi program yang ada, setelah diverifikasi nanti di setuju oleh pak lurah baru nanti dananya dicairkan. Demikian juga saat laporan pak carik akan memverifikasi dan nanti dilaporkan ke pak lurah. Disamping itu warga juga mengawasi, jika ada sesuatu yang tidak sesuai warga bisa melaporkannya ke aparat desa. Disini semuanya selalu di *cross-check* mas. Termasuk juga saat perencanaan nanti akan ada tim yang memverifikasi apakah laporan masyarakat itu benar dan rencana program yang diusulkan itu sesuai.”

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

“Setiap kegiatan terutama pembangunan fisik, desa biasanya membuat plakat yang berisi detil program yang sedang dilakukan. Jika ada sesuatu yang menurut warga tidak sesuai dengan perhitungan yang dilakukan warga dibandingkan dengan pengerjaan yang dilakukan, warga bisa menilai dan melaporkan ke aparat desa.”

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

“Selalu ada mas wong kita sering berhubungan dengan warga di musyawarah, karena kita selalu melibatkan warga sekitar.”

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

“Disini dipilah-pilah dulu mas, lalu diambil yang terbaik dan nanti digunakan untuk kedepannya menghasilkan hal yang lebih baik agar semua pihak baik pemerintah desa dan masyarakat sama-sama puas.”

Transkrip Wawancara

Dengan Bapak Budi Santoso, Kepala Dukuh Ngabean Wetan

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjangkau aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Ada mas. Jadi setiap ada program atau pembangunan atau kegiatan itu setiap 3 bulan sekali mengadakan pertemuan pengurus di pedukuhan, yaitu dari lembaga-lembaga dari PKK, RT, RW, Posyandu, Karang Taruna, jadi setiap 3 bulan sekali kita berkumpul untuk menampung aspirasi dari bawah. Yak arena pandemi ini belum bisa dilakukan.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Keterlibatan masyarakat di sini aktif karena setiap kegiatan kita selalu melibatkan masyarakat, entah itu pembangunan yang fisik atau non-fisik tentunya masyarakat harus terlibat karena jika tidak terlibat hasilnya tidak maksimal.”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Setiap kegiatan di pedukuhan ini semua elemen selalu terlibat, jadi semua lembaga dan semua elemen harus selalu terlibat.”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Untuk tindak lanjut dari pemerintah desa, jika dulu ada RPJMDuk sekarang pedukuhan akan mengajukan kegiatan-kegiatan ke desa dan di kantor desa akan melakukan sekala prioritas dan akan menindaklanjuti usulan-usulan dari pedukuhan.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

“Kalau untuk pengambilan keputusan tergantung dari Kepala Desa atau dari pemerintah desa untuk dana desa karena tidak semua usulan itu bisa dipenuhi, karena ada 17 pedukuhan tidak semua usulan bisa diakomodir karena sekarang dana desa untuk sekarang difokuskan untuk COVID, sehingga sekarang belum bisa melakukan pembangunan.”

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

“Tergantung situasi dan kondisi, tetapi sampai sekarang apa yang jadi keputusan desa itu yang dijalankan.”

7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?

“Biasanya pakai banner atau papan pengumuman, ada juga yang dari desa untuk terjun langsung ke Pedukuhan untuk sosialisasi. Atau dari group WA akan dilakukan sosialisasi.”

8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

“Tidak semua masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi, hanya wakil-wakilnya seperti Ketua RT, Sekretaris RT atau yang mewakilkan dari RT atau langsung dari RW dikarenakan keterbatasan tempat.”

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?

“Selama ini tidak ada kendala karena sudah direncanakan, hanya kendalanya itu dana tidak selalu tersedia terutama untuk 2 tahun ini dikarenakan pandemi ini sehingga pembangunan-pembangunan yang direncanakan terhenti.”

10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

“Masyarakat ikut berpartisipasi melakukan swakelola, karena tidak semua dana terealisasi karena volume pengerjaan/kegiatan tidak sesuai dengan dana yang turun dari desa, sehingga swadaya masyarakat selalu diharapkan dan memang swadaya masyarakat masih ada dan bentuknya bermacam—macam.”

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?

“Tentunya proyek-proyek ini berdampak positif karena yang diharapkan masyarakat dari proyek-proyek ini selalu ditunjukkan kepada masyarakat. Untuk sementara ini dari dulu untuk program yang ada untuk pembangunan fisik dan akan dilanjutkan setelah pandemi selesai.”

12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

“Karena selama ini baru proyek-proyek fisik untuk jalan, jadi yang dirasakan manfaatnya yaitu memperlancar dan mempernyaman jalan yang digunakan masyarakat, tetapi karena pandemi selama dua tahun ini belum ada proyek fisik yang dikerjakan.”

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

“Ada, biasanya dari pedukuhan akan memberikan laporan pertanggungjawaban yang akan mengontrol dan juga dibentuk panitia pembangunan yang akan melaporkan ke pemerintah desa yang terbentuk dari perangkat desa dan perangkat pedukuhan.”

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

“Dari pedukuhan sendiri untuk mengontrol, ada perwakilan yang berasal dari pedukuhan yang menjadi pengurus di lembaga desa untuk menjadi wakil dari pedukuhan untuk mengontrol jalannya pembangunan yang belum, sedang, dan sudah berjalan di desa. Jadi lembaga desa yang diwakilkan oleh perwakilan dukuh menjadi sarana kontrol masyarakat di pedukuhan.”

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

“Ada memang kritik dan saran dari masyarakat.”

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

“Biasanya disampaikan melalui kepala dukuh dan nanti segala masalah di pedukuhan akan ditampung oleh pak dukuh dan nanti akan disampaikan biasanya di Rapat Koordinansi di kantor desa.”



Transkrip Wawancara

Dengan Bapak Suhardi, Kepala Dukuh Ngabean Kulon

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Musyawarah selalu ada, tapi karena ada pandemi musyawarah hanya dilakukan dengan tokoh-tokoh utama masyarakat seperti ketua RW. Sebelum pandemi biasanya musawarah dilakukan dengan mengundang banyak orang, seperti ketua RW, ketua RT, dan tokoh masyarakat.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Masyarakat lebih sering dan senang menerima hasil pembangunan selama ini.”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Hanya tokoh-tokoh masyarakat saja yang terlibat. Tapi saya kira itu sudah mewakili masyarakat sekitar.”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Masyarakat juga ikut terlibat mas. Selain itu masyarakat juga melakukan swadaya masyarakat dikarenakan biasanya pembangunan sering tidak sepenuhnya dilakukan karena keterbatasan dana, sehingga masyarakat biasanya melakukan swadaya.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

“Kita kumpulkan, lalu melakukan musyawarah mufakat demi kepentingan bersama.”

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

“Kebanyakan masyarakat menerima karena menganggap keputusan yang diambil merupakan bantuan dari pemerintah desa yang akan membantu masyarakat sekitar.”

7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?

“Biasanya disini hanya mengumpulkan masyarakat sekitar, terutama RT, RW, dan tokoh masyarakat. Tidak ada baliho untuk sosialisasi atau media lainnya.”

8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

“Tidak semua masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi, hanya wakil-wakilnya seperti Ketua RT, Sekretaris RT atau yang mewakilkan dari RT atau langsung dari RW dikarenakan keterbatasan tempat.”

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?

“Selama ini tidak ada masalah. Karena masyarakat merasa sudah dibantu dan masyarakat juga melakukan swadaya sehingga tidak ada keinginan

masyarakat untuk menjatuhkan apa yang sudah dilakukan pemerintah desa.”

10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

“Kontribusi masyarakat di pedukuhan ini ketika proyek dilaksanakan hampir tidak ada. Masyarakat hanya ingin menerima jadi, karena itu merupakan usulan dari pedukuhan .”

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?

“Masyarakat senang, karena usulan masyarakat sudah diterima dan sudah dilaksanakan.”

12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

“Manfaatnya positif, seperti jalanan sekarang halus jadi enak untuk lewat enak. Lalu saluran air untuk pembuangan bisa membuat wilayah pedukuhan tidak banjir.”

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

“Biasanya waktu pembangunan ada. Tapi untuk pemeliharaan diserahkan masyarakat. Terkadang dari pihak desa juga mengontrol ketika tahap perencanaan dengan ikut musyawarah di pedukuhan, tapi kadang desa

hanya menerima hasil usulan dari pedukuhan. Di kantor desa nanti baru dirapatkan untuk dipilih mana yang lebih bermanfaat.”

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

“Masyarakat hanya mengontrol dengan mengecek dan melihat mana yang rusak lagi, nanti masyarakat melaporkan ke RT atau RW dan nanti pedukuhan mengusulkan ke kantor desa.”

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

“Biasanya ada saran, pembangunan harus bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya dan harus dirawat sebagaimana mestinya agar awat.”

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

“Biasanya kita rapatkan dan nanti akan dilaporkan ke kantor desa.”

Transkrip Wawancara

Dengan Bapak Kawit, Kepala RW 34 Pedukuhan Ngabean Kulon

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjangking aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Pasti ada. Kalau ada bantuan-bantuan gitu dari lembaga RT atau lembaga RW dan pak Dukuh pasti mengadakan pertemuan untuk mengurus dana itu. Kepengurusan RT ada dan kepengurusan RW ada juga.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Masyarakat sangat antusias sekali untuk gotong royong selama saya menjadi RW. Masalah gotong royong, masalah pertemuan-pertemuan itu masyarakat masih bagus sekali. Masyarakat masih aktif. Itu sebelum pandemi, tapi selama pandemi ini belum diadakan.”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Kalau di sini mungkin dari pedukuhan cuman tokoh-tokoh pedukuhan. Terutama jika ada MusDuk atau Musyawarah Pedukuhan”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Disini khususnya di pedukuhan Ngabean Kulon ini jika ada rencana pembangunan dusun, kita harus mengajukan proposal ke BPD kelurahan. Jadi aspirasi masyarakat nanti disalurkan ke BPD. Lewatnya memang ke

BPD, yang berwenang memang BPD yang nanti akan membuat proposal dan nanti mereka akan memprioritaskan program mana yang diambil dulu.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

“Kalau di kelurahan sini kebanyakan musyawarah, ada apa-apa pasti musyawarah baik di tingkat RW, pedukuhan, dan desa. Jadi tokoh masyarakat selalu aktif ikut serta ambil bagian.”

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

“Ya kalau sini mungkin tokoh-tokoh masyarakat sebagai wakil masyarakat kebanyakan ya setuju aja asalkan itu adalah hal-hal yang bagus hal-hal yang baik yang digunakan untuk memajukan kampung Ngabean Kulon. Masyarakat ya ngikut saja”

7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?

“Kalau RW yang mengumpulkan kan saya, sebelum pandemi biasanya saya sering kumpulkan untuk musyawarah di wilayah saya di rumah saya. Jadi sosialisasi lewat musyawarah. Tapi kalau dari desa biasanya pamong-pamong desa akan datang ke sini nanti diundang oleh pak dukuh untuk sosialisasi di tingkat pedukuhan. Lalu ada group WA juga.”

8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

“Perwakilan. Perwakilan itu termasuk tokoh-tokoh masyarakat. Yang diundang hanya tokoh-tokoh masyarakat.”

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?

“Pembangunan sudah diatur di kelurahan. Jadi di sini setiap satu tahun akan mengajukan dana untuk pembangunan, di sini biasanya minta 50 juta per pedukuhan dan nanti di sebar ke RW yang ada. Dan biasanya disebar secara bergilir agar tidak ada kecemburuan sosial. Kendalanya ya waktu karena misal RW sini ada rencana kegiatan tapi baru giliran RW lain yang baru dapat giliran.”

10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

“Ya masyarakat membantu. Ya jika ada gotong royong atau pekerjaan dari kelurahan ya di sini masyarakat sangat aktif. Ya masyarakat sukarela memberikan snack, konsumsi. Masyarakat masih aktif.”

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?

“Diterima dengan bagus. Selalu dianggap positif. Karena setiap ada dana itu di musyawarahkan dana ini untuk apa. Karena selalu ada rapat RW juga ada rapat pedukuhan di sini.”

12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

“Ya banyak sekali. Dana yang diberikan (dana desa) nanti masih dibagi-bagi kepada RT disini, lalu nanti diprioritaskan mana yang lebih penting untuk didahulukan. Manfaat ke masyarakat selalu positif.”

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

“Iya, ada mas. Karena yang mengerjakan adalah orang-orang kontraktor maka masyarakat hanya membantu sedikit, yang menangani sana semua jadi masyarakat hanya menerima saja. Termasuk BPD, seperti seksi pembangunannya yang biasanya terjun ke lapangan, seperti cek lokasi dan jika selesai juga di cek.”

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

“Masyarakat kadang satu atau dua orang yang merasa kurang pas. Karena dana kan terbatas ya.”

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

“Kritik dan saran biasanya lewat BPD. Kalau ada pertemuan BPD di pedukuhan nanti akan disampaikan ke musyawarah di kelurahan. Jadi ada wakil di kelurahan. Selama pandemi ini pertemuan warga hampir tidak ada, walaupun adapun hanya terbatas perangkat inti saja.”

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

“Khususnya di pedukuhan sini pak lurah sangat senang sekali dengan kampung sini. Karena kalau ada apa-apa beliau langsung datang kesini turun untuk meninjau pedukuhan sini. Jadi di sini selalu dibantu dari pihak desa.”

Transkrip Wawancara

Dengan Bapak Asri Wibowo, Kepala RW 35 Ngabean Kulon

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjangkau aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Oh ada mas. Ini nanti fokus musyawarahnya jika menggunakan dana desa nanti bersama Pak Dukuh, ini nanti RT dan RW bersama sesepuh diundang. Nanti masing-masing RW punya program apa, nanti kalau misalkan dana desa bisa digunakan untuk program tertentu ya nanti menggunakan dana desa. Biasanya setiap setahun sekali ada mas musyawarahnya, kecuali saat pandemi ini.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Di sini digilir mas, karena ada 4 RW disini maka akan digilir mana RW yang mendapatkan, keterlibatan masyarakat disini ikut pada giliran tersebut.”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Hanya pengurus-pengurus saja mas. Hanya perwakilan saja yang biasanya mengikuti pengambilan keputusan.”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Aspirasi biasanya ada mas. Cuma karena dana desanya itu hanya meliputi kegiatan tertentu jadi tidak semua aspirasi atau proposal ke desa tidak bisa dilanjutkan menggunakan dana desa, tetapi menggunakan swadaya masyarakat.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

“Ya itu mas kalau dalam musyawarah atau rapat itu disini tokoh masyarakat selalu membahas masalah apa yang ada di lingkungan, tetapi karena pandemi ini mas tidak ada rapat atau pertemuan apapun.”

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

“Stagnan saja sih mas, warga ya biasa saja mas tidak heboh. Kalau ada bantuan biasanya dikabari. Ya warga biasanya menerima apa yang diambil.”

7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?

“Media elektronik sih mas. Tapi kadang ada petugas atau pegawai kelurahan bahkan kadang pak lurah datang ke pedukuhan sini mas, menjabarkan program apa yang akan dilaksanakan. Tapi pemberitahuan resmi lewat undangan mas. Kalau baliho biasanya buat laporan keuangan atau anggaran desa dan laporan dana desanya untuk apa.”

8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

“Perwakilan saja mas. Tidak bisa semua warganya datang, RT, RW seperti itu.”

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?

“Kalau dananya kurang itu nggak sih mas, kalau kurang pun warga bisa iuran untuk menambah yang kurang. Kalau kendala biasanya nggak ada sih mas, kalau ada dana ya sudah dilaksanakan programnya.”

10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

“Masyarakat masih mau dan positif untuk membantu dan bergotong royong untuk ikut andil. Warga masih mau memberikan konsumsi, juga membantu tenaga. Memang di sini keluar uang agak susah, tapi untuk keluarin konsumsi untuk segala kegiatan pasti mau dan berlebih biasanya.”

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?

“Kalau ada pelaksanaan proyek itu biasanya gak lama. Biasanya pengaruhnya positif. Yang jelas proyeknya tidak mangkrak”

12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

“Ya manfaatnya positif dan berguna untuk masyarakat lah mas. Tapi entah kenapa proyek di sini fokusnya untuk penggunaan dana desa hanya terfokus pada proyek jalan dan irigasi ya mas.”

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

“Kalau mengontrol kegiatan atau pelaksanaannya di sini ada mas biasanya dari desanya. Itu nanti dari desanya ada yang datang untuk mengontrol atau mengawasi jalannya program,. Kalau pemeliharaan kita serahkan ke wilayah masing-masing ke RW atau ke RTnya. Kalau Perencanaan dan pelaksanaan kita serahkan ke desanya.”

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

“Kalau ada kendala-kendala atau kekurangan atau ketidakpuasan dari masyarakat biasanya langsung ke perangkat desa atau perangkat di sini. Tapi kalau saat pelaksanaan proyek biasanya lapornya lewat perangkat di sini lalu ke perangkat desa.”

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

“Kritik di sini tidak ada kritik sih mas. Biasa-biasa saja. Saran juga gitu mas, masyarakat di sini menerima saja, nggak heboh gitu mas. Ya karena sudah dijatah masing-masing sih mas.”

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

“Langsung ada tindakan dari pemerintah desa. Biasanya lapor ke RT apa RW dan nanti ke pak dukuh. Atau jika pak dukuh nanti belum bisa menyampaikan misal saya bisa langsung ke kantor desa.”

Transkrip Wawancara

Dengan Bapak Purwanto, Kepala RW 36 Pedukuhan Ngabean Kulon

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Jadi dalam menjaring aspirasi, pak lurah mendelegasikan ke masing-masing pedukuhan. Kalau di Ngabean Kulon, kita biasanya dikumpulkan dulu dari RT. Jadi di RW ini setiap Jumat Kliwon biasanya ada perkumpulan rutin, dan saya pada perkumpulan itu menjaring aspirasi warga. Kalau musyawarahnya di sini berbasis RW kalau di RW sini, juga setiap Jumat Kliwon dikumpulkan semua warga, kumpulan bapak-bapak. Nanti aspirasi di sini ditampung dan kemudian dibawa ke tempatnya pak dukuh, nanti dirapatkan dengan perangkat pedukuhan nanti di rapat itu kita sampaikan. Jadi masyarakat tidak langsung menyampaikan di sana tapi lewat pengurus RW. Termasuk nanti sosialisasinya kalau sudah ditampung di pedukuhan nanti di *godok* di kelurahan. Kalau sudah nanti dibalik dari perangkat desa nanti sosialisasi ke pedukuhan, ke perwakilan masyarakat seperti perangkat pedukuhan. Jadi modelnya perwakilan seperti ketua RT dan RW yang nanti akan mensosialisasikan ke warga. Jadi forum musyawarah di sini berbasis RW.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Masyarakat hanya sebatas mengusulkan saja mas di sini, tidak sampai pendanaan. Pendanaan itu dirembug di tingkat desa, jadi dari bawah atau dari masyarakat hanya usulan kegiatan-kegiatan dan nanti di buat rencana dananya di kantor desa. Jadi kami RT/RW tidak sampai ngerembug pendanaan, yang mengurus pendanaan dari kantor desa. Kami ketua RT/RW hanya memberikan usulan saja. Karena itu kepentingan desa mas.”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Yang memutuskan tersebut bukan masyarakat tetapi dari pihak desa. Memang usulan dari masyarakat, kan memang berbasis prioritas, nanti usulan yang disetujui yang mana nanti yang mendapatkan alokasi dana nanti diputuskan oleh pihak desa. Tidak seluruh elemen masyarakat terlibat, hanya pihak desa. RT/RW tidak sampai terlibat dalam pengambilan keputusan untuk pendanaannya.”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Jadi aspirasi masyarakat selama proses perencanaan ya itu, kita menjaring aspirasi masyarakat ketika perkumpulan saat Jumat Kliwon. Lalu kita ajukan ke rapat pedukuhan. Nanti dari pihak dukuh aspirasi masyarakat akan dibawa ke rapat di kantor desa. Jadi perwakilan mas.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

“Kalau kita hanya kadang-kadang saja diajak untuk musyawarah di tingkat desa, tapi yang sering tokoh-tokoh masyarakat di sini dilibatkan di tingkat pedukuhan dalam pengambilan keputusan itu. Nanti tindak lanjutnya kepala dukuh akan menindak lanjutinya di tingkat desa. Kita sebatas keputusan hanya pada keputusan di pedukuhan, kadang-kadang saja kita diajak musyawarah di tingkat kelurahan tapi tidak rutin. Yang rutin di sini ya di tingkat RW dan tingkat pedukuhan.”

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

“Masyarakat pada prinsipnya ikut saja, menerima apa yang sudah disiapkan. Kan biasanya berbasis kebutuhan, kita hanya mengusulkan saja. Nah kalau ada kekurangannya, nanti ditopang dari dana swadaya masyarakat.”

7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?

“Ada spanduk atau baliho kalau di sini di depan SMA Piri situ. Lalu dalam bentuk presentasi forum-forum yang diselenggarakan oleh masyarakat, kaya di sini pas perkumpulan Jumat Kliwon kadang datang atau sebaliknya tokoh-tokoh masyarakat di sini diundang ke kantor desa nanti presentasi di sana. Juga kadang ada edaran dari desa ke masyarakat, tapi biasanya lewat kita perangkat pedukuhan nanti kita gandakan dan sebarluaskan walaupun jarang sekali.”

8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

“Perwakilan. Tidak semua masyarakat itu ikut, walaupun kadang juga bisa ada. Jadi kadang dari desa aparatnya ada yang ikut *nimbrung* di kumpulan masyarakat RW di sini lalu mensosialisasikan. Tapi seringnya di sini ya perwakilan dari RT/RW dan pedukuhan diundang ke kantor desa untuk nanti diberikan sosialisasi. Nah perwakilan itu nanti mempunyai tugas untuk mensosialisasikannya ke masyarakat.”

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?

“Kalau yang saat ini dirasakan ya karena keterbatasan dari pandemi *COVID* ini mas. Sehingga kan kegiatan-kegiatan itu belum bisa dilaksanakan, apalagi dana-dana yang seharusnya untuk kegiatan yang sudah direncanakan akhirnya terbagi untuk penanganan pandemi. Kendala teknis jarang ada, tapi ya itu kendala dari masa pandemi. Kendala dari pengembangan desa bisa diatasi lah. Dalam kondisi normal apa yang sudah direncanakan pasti terlaksana.”

10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

“Masyarakat pada prinsipnya mendukung saja. Mendukung program-program yang sudah direncanakan desa. Dan kalau nanti menyentuh masyarakat di kampung Ngabean Kulon, masyarakat langsung berpartisipasi aktif. Jadi warga masih mau terlibat untuk gotong royong mensukseskan program dari desa. Saya jamin semua masyarakat, ya mayoritas lah masyarakat ikut berpartisipasi.”

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?

“Ya tentu pengaruh pelaksanaan proyek ini masyarakat merasa sangat terbantu. Masyarakat terbantu dari bantuan proyek dari desa ini.”

12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

“Manfaatnya ya sangat positif. Masyarakat bisa menikmati bantuan dari desa. Contohnya sekarang setelah proyek instalasi air bersih, masyarakat bisa menikmati air bersih dengan biaya yang murah sekali. Dibandingkan dari PDAM yang mungkin lebih mahal, di sini warga bisa merasakan air bersih Rp 1500,00 per meter kubik yang lebih murah.”

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

“Jadi sarana untuk mengontrol dari masyarakat sendiri ya pengawasan saja. Jadi misalkan ada penyimpangan-penyimpangan gitu nanti bisa diingatkan, aspirasi masyarakat seperti itu biasanya lewat ketua RT/RW, nanti kita bawa ke desa. Dari desa juga kadang ada yang mengontrol di sini. Jadi setiap sebulan sekali dari desa akan mengontrol ke sini untuk mengecek dan mengontrol proyek yang ada di sini. Itu semua ada kendali mutunya, jadi nanti dari pihak desa akan bekerja sama dengan pihak terkait seperti Dinas Kesehatan. Jadi istilahnya pihak desa selalu menerjunkan orang-orangnya

ke sini untuk mengontrol, kita tetap dibantulah dari pihak desa/kelurahan itu.”

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

“Masyarakat biasanya secara tidak langsung keterlibatannya. Yang terlibat langsung biasanya dilakukan oleh ketua RT/RW, dari pedukuhan, aparat desa dan perangkatnya. Jadi masyarakat hanya menyampaikan aspirasinya melalui kita, selama ini tidak langsung ke sana (desa) sih nggak. Di sini kita tampung baru nanti kita salurkan ke sana, jadi istilahnya sudah mendelegasikan ke kami aparat kampung seperti ketua RT dan RW.”

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

“Kritik dan saran itu ada, dan nanti disalurkan aspirasinya ke aparat setempat yaitu kita. Nah nanti yang meneruskan ya kita aparat pedukuhan, juga biasanya lewat dukuh dulu baru nanti ke kelurahan.”

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

“Jadi ada sebagian yang diakomodir kritik dan sarannya, tapi juga ada yang ditolak karena kebijakan atau satu hal dan lainnya. Tapi yang konstruktif yang artinya untuk perbaikan kedepannya biasanya ditampung untuk program-program selanjutnya.”

Transkrip Wawancara

Dengan Pak Yusuf Yusroni, Kepala RW 41 Pedukuhan Ngabean Kulon

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Ya ada cuman jarang sekali. Di sini itu orangnya pasif. Untuk pertemuan saja susah. Apalagi membahas seperti ini.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Jarang dapat. Di sini gak pernah dapat dana desa mas.”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Keterlibatan di sini cuman pengurus-pengurus saja. Masyarakat manut-manut saja, pertemuan-pertemuan gitu jarang. Pak RT saja jarang ikut juga,”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Kalau di sini ya ngikut saja, ngikut pak dukuh dan desa. Kita ya nggak ada protes-protes ya karena jarang ada pertemuan dan sosialisasi saja jarang. Bapak-bapak aja jarang pertemuan. Kumpul aja susah.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

-

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?
-
7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?
“Saya sebagai wakil juga untungnya masih bisa ikut pertemuan di pedukuhan. Di sini RTnya gak mau.”
8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?
“Biasanya hanya perwakilan saja mas.”
9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?
-
10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?
“Kita manut desa saja mas. Apa yang desa inginkan kita manut saja. Kita ada pengumuman di kampung kita ikuti, ada rapat kita ikutin, hanya perwakilan-perwakilan saja. Proyek-proyek saja gak pernah dapat, kampung sini gak pernah dapat.”
11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?
-
12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

-

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

-

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

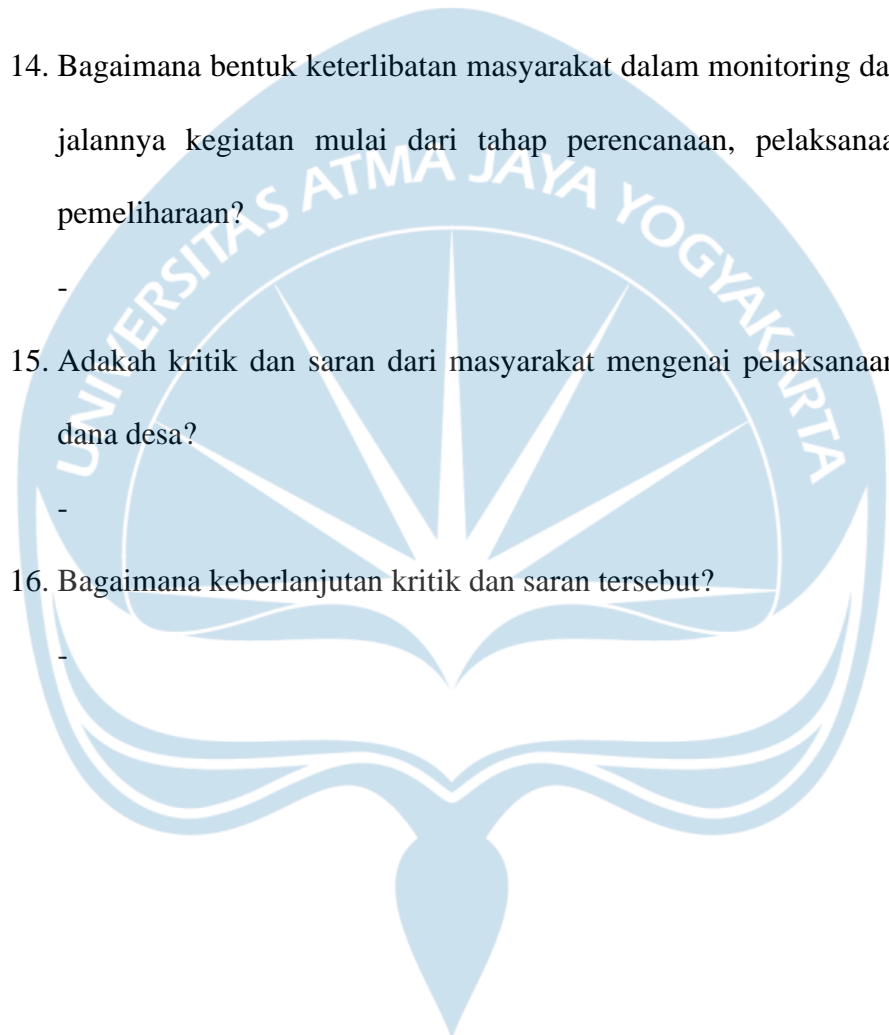
-

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

-

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

-



Transkrip Wawancara

Dengan Bapak Joko Riyanto, Kepala RW 37 Pedukuhan Ngabean Wetan

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjangking aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Musyawarah biasanya adanya di pedukuhan, namanya MusDuk atau musyawarah pedukuhan.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Masyarakat biasanya hanya diwakilkan saja, disini diwakilkan dari RT, RW, tokoh masyarakat yang ada.”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Biasanya hanya wakilnya saja yang terlibat, tapi biasanya ya sudah menjangking semua masyarakat karena biasanya ada pertemuan di sini setiap bulan. Biasanya ada kritik, saran, masukan, dan segala macamnya biasanya ada di pertemuan bulanan. Nanti di MusDuk rangkumannya disampaikan disana.”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Ya seperti yang saya katakan tadi mas, dikumpulkan segala macam saran dan masukan di pertemuan bulanan baru nanti disampaikan di MusDuk.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

“Paling dominan biasanya hanya tokoh masyarakat dan pemerintah desa dan pedukuhan, RT dan RW hanya menyampaikan pendapat di MusDuk.”

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

“Biasanya menerima apa yang diputuskan pemerintah, karena sudah mempercayakan amanat warga ke wakilnya.”

7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?

“Di sini paling hanya kumpul-kumpul di padukuhan. Juga kadang dari group WA walaupun biasanya tidak resmi, resminya kumpul-kumpul di Padukuhan.”

8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

“Perwakilan saja mas.”

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?

“Kalau disini kemarin karena pandemi dan masih berlanjut sampai sekarang, tidak ada pembangunan sama sekali dan kegiatan warga belum ada. Dananya kesedot untuk penanggulangan *COVID*. Tapi sebelum pandemi terakhir ada pembangunan saluran air di salah satu RT.”

10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

“Ya kita mendukung sekali kalau ada program dari desa. Kita dari RT dan RW juga *nombok* banyak sekali karena dana dari desa kadang kurang.”

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?

“Pengaruhnya besar sekali. Kalau saluran air biar tidak banjir, kalau jalan jadi halus dan ini dari dana desa ya.”

12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

“Ya ini semua program-programnya seperti pembersihan sungai kita semua mendukung dan sangat merasakan manfaatnya. Di sini warga walupun cuman di *woro-woro* masih aktif untuk bergotong royong.”

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

“Jadi di saat perencanaan, dari desa ada yang namanya tim verifikasi. Sebelum itu mejadi RKP arau Rencana Kerja Pemerintah Desa, tim itu akan mengecek turun ke lapangan apakah benar tidak usulan dari warga. Lalu setelah jadi pelaksanaan ada tim BPK yaitu Badan Permusyawaratan Kelurahan, yang mengawasi pembangunan dan pemerintahan desa.”

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

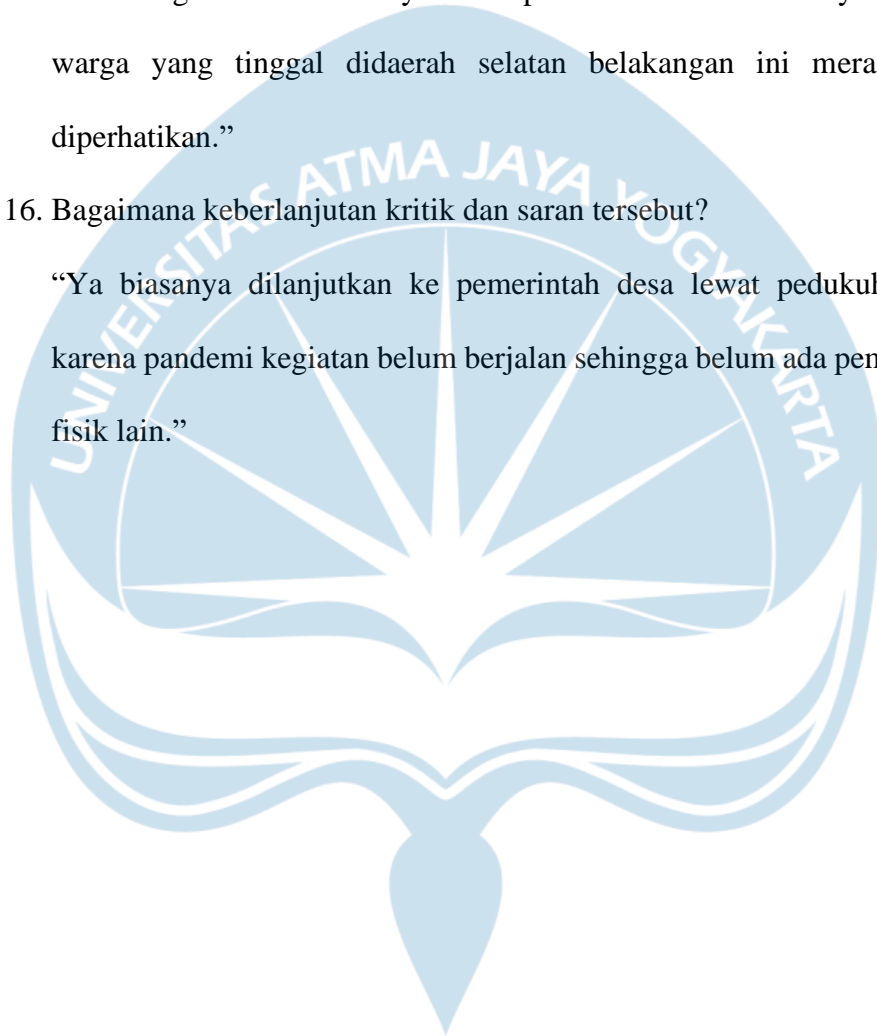
“Biasanya warga hanya bertanya saja program-program yang sudah direncanakan ke kepala dukuh atau ke kepala RW.”

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

“Ya mungkin karena adanya skala prioritas karena usulan yang banyak, warga yang tinggal di daerah selatan belakangan ini merasa kurang diperhatikan.”

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

“Ya biasanya dilanjutkan ke pemerintah desa lewat pedukuhan, tetapi karena pandemi kegiatan belum berjalan sehingga belum ada pembangunan fisik lain.”



Transkrip Wawancara

Dengan Bapak Endar, Kepala RW 38 Pedukuhan Ngabean Wetan

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjangking aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Biasanya ada mas, di balai padukuhan sini. Biasanya membahas RPJM Dukuh yang datang biasanya tokoh-tokoh masyarakat saja.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Kalau disini biasanya masyarakat hanya memberikan usulan-usulan saja ke wakil RT, RW, dan tokoh masyarakat yang terutama berada di pedukuhan.”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Bisa dibilang semua ikut mas, karena masyarakat sudah diwakilkan oleh wakil-wakilnya dari bawah seperti RT dan lalu RW sini.”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Biasanya aspirasi masyarakat terutama dalam bentuk usulan-usulan tersebut akan ditampung dulu dari tingkat bawah seperti RT dan RW, lalu nanti dibawa ke pedukuhan dan nantinya setelah dibahas di pedukuhan akan disampaikan ke kantor desa.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

“Kalau disini peranan tokoh masyarakat terutama dalam kegiatan musyawarah, nanti akan dicari bagaimana jalan untuk mendapatkan kata mufakat.”

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

“Kebanyakan masyarakat mendukung mas apa yang sudah menjadi keputusan bersama, dan nantinya masyarakat biasanya akan melaksanakan apa yang sudah diputuskan.”

7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?

“Kalau disini biasanya lewat *Whatsapp* Group mas untuk sosialisasi.”

8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

“Di RW sini dan di pedukuhan sini biasanya hanya perwakilan masyarakat saja mas.”

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?

“Mungkin dibandingkan dengan waktu yang dahulu, masyarakat langsung mengelola dana desa yang diserahkan ke pedukuhan masing-masing. Sekarang semuanya dikelola oleh pihak desa Sinduharjo. Jadi terkadang ada program-program masyarakat di daerah sini yang tertunda karena semuanya di skala prioritas di Kantor Desa.”

10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

“Kalau di pedukuhan ini terutama RW ini jika ada program dari desa ya warga biasanya bekerja bersama, ya gotong royong semampunya. Ada yang memberikan konsumsi, tenaga, dan lainnya.”

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?

“Banyak pengaruhnya, dan semuanya positif mas terutama dalam pembangunan fisik. Hanya karena pandemi ini pembangunan fisik belum berjalan lagi.”

12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

“Manfaatnya terasa dan banyak mas, terutama manfaatnya terasa untuk memajukan wilayah masing-masing.”

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

“Kalau monitoring dan mengontrol disini biasanya ada perwakilan dari desa mas. Dari tahap hulu sampai akhir biasanya ada yang mengawasi.”

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

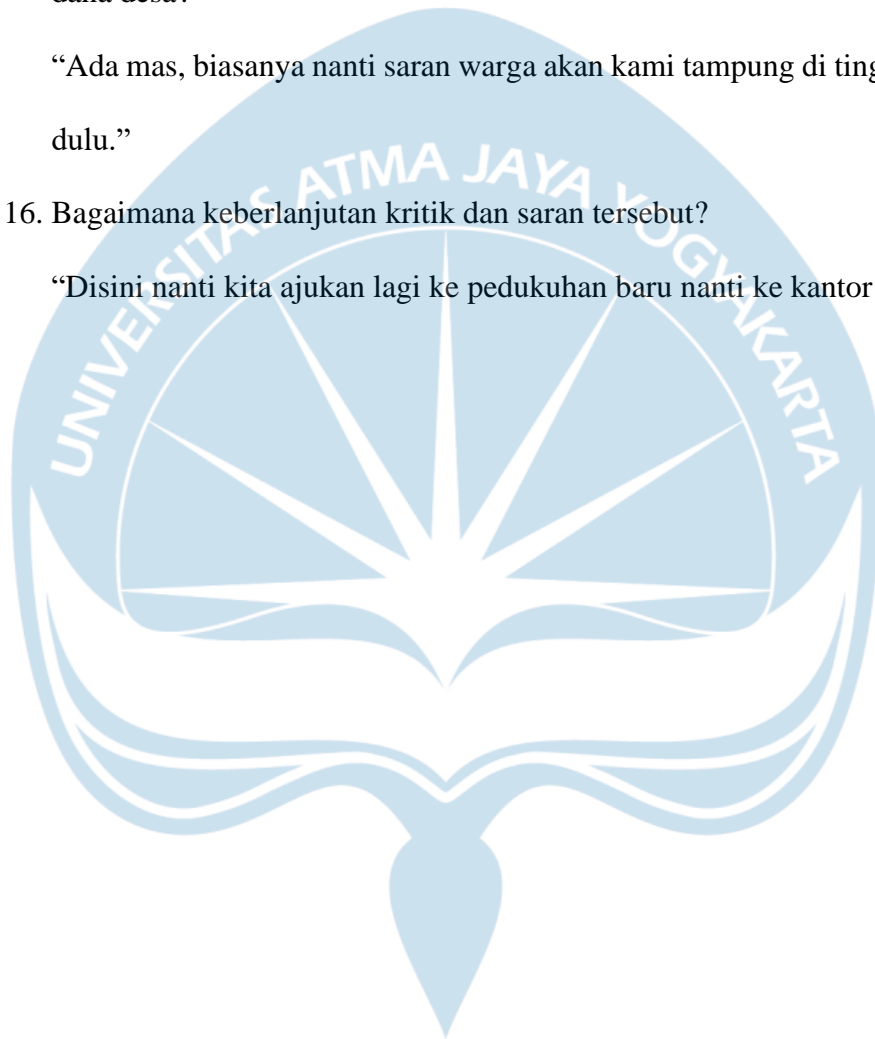
“Kalau disini masyarakat saling menjaga bantuan yang diberikan dari desa sejak awal sampai akhir terutama jika bantuan itu digunakan untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak.”

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

“Ada mas, biasanya nanti saran warga akan kami tampung di tingkat bawah dulu.”

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

“Disini nanti kita ajukan lagi ke pedukuhan baru nanti ke kantor desa.”



Transkrip Wawancara

Dengan Bapak Kiswanto, Kepala RW 42 Pedukuhan Ngabean Wetan

1. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi untuk kegiatan desa yang menggunakan dana desa?

“Mesti ada musyawarah untuk penjaringan aspirasi. Tapi karena ada *COVID* ini boleh dikatakan pembangunan untuk fisik tidak ada. Sampai sekarang untuk dana desa belum ada untuk pembangunan fisik.”

2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dana desa?

“Kalau di desa ini biasanya dana desa untuk per pedukuhan, bukan per RW. Nanti di pedukuhan akan dibuat suatu kesepakatan, kalau dulu digilir sih mas penggunaanya di pedukuhan ini. Keterlibatan masyarakat sangat sangat aktif. Bahkan dari dana itupun dari dana desa jika masyarakat dimintai untuk dana swadaya untuk membantu program dengan dana desa masih mau. Masyarakat masih mau membantu, respon masyarakat sangat bagus. Nah kalau perencanaan di desa, kan harus dimulai dari musyawarah di masyarakat dulu kalau di sini di MusDuk (musyawarah pedukuhan), nanti membuat perencanaan dan skala prioritas. Setelah MusDuk, nanti kita membuat beberapa item pekerjaan dan nanti dibawa ke musyawarah desa. Nanti disana masih di skala prioritas lagi. Karena ada *COVID* ini dananya langsung dialihkan untuk penanganan pandemi. Padahal dana desa

ada setiap tahun, nanti dibuat untuk jangka menengah atau jangka panjang. Tapi setiap tahun jika dana desa muncul kita langsung musyawarah lagi.”

3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?

“Ya masyarakat sangat terlibat, ya karena adanya MusDuk itu. Ya karena keterbatasan tidak semua masyarakat diundang, hanya RT/RW dan beberapa elemen masyarakat yang biasanya mengambil keputusan.”

4. Adakah gagasan/aspirasi masyarakat selama proses perencanaan dana desa, dan bagaimana tindak lanjutnya dari pemerintah desa?

“Gagasan masyarakat ya biasanya tercangkum di MusDuk. Tapi embrionya ya dari pertemuan-pertemuan RT/RW, nanti hasil dari pertemuan yang berisi kesepakatan itu dibawa ke Musyawarah Pedukuhan. Nanti di MusDuk dibuat RPJM.”

5. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?

“Ya hanya diwakilkan saja mas.”

6. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?

“Karena embrio pengambilan keputusan dari bawah dari pertemuan masyarakat, ya otomatis apa yang disetujui desa ya menerima, karena RT/RW sudah mewakili masyarakatnya. Tanggapan masyarakat ya positif karena suara sudah terjaring dari bawah. Tapi tetap nanti di musyawarah desa nanti di skala prioritas lagi. Kalau di sini sih mas biasanya daripada dibagi per RT kan hasilnya sedikit, biasanya dana desa yang diberikan ke

RW dijadikan satu untuk satu program di RW tersebut agar program atau proyek tersebut benar-benar selesai.”

7. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program-program desa Sinduharjo?

“Ya media utamanya ya mas ya musyawarah mufakat. Atau kadang sosialisasi bisa lewat pak dukuh. Untuk sosialisasi di sini saya rasa baliho seperti itu tidak ada.”

8. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

“100% datang tidak bisa biasanya mas, hanya perwakilan. Tapi karena dimulai dari bawah, kita menjaring dari bawah ya harusnya sudah mewakili seluruh masyarakat.”

9. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Sinduharjo, terutama saat pelaksanaan dana desa?

“Kalau kendalanya ya keterbatasan dana desa itu kan biasanya dibagi seluruh Desa Sinduharjo. Jadi kadang program yang kita ajukan dengan dana desa, kadang-kadang yang diterima tidak bisa memenuhi seluruh keinginan masyarakat. Oleh karena itu walaupun ada kekurangan masyarakat biasanya mau membantu swadaya. Karena misal jika jalan yang akan diperbaiki tidak bisa di-cover seluruhnya dengan dana desa sehingga mau tidak mau harus swadana masyarakatnya. Untungnya masyarakat masih mau swadaya.”

10. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan desa yang sudah direncanakan?

“Masyarakat ya mau aja mas swadaya. Juga untuk beberapa program masih mau swadana untuk membantu mensukseskan program yang sudah direncanakan.”

11. Apa pengaruh pelaksanaan proyek yang didanai dana desa di desa Sinduharjo terhadap masyarakat sekitar?

“Pengaruhnya ya sangat-sangat positif, sangat-sangat membantu terutama untuk kelancaran program-program RT atau RW yang sudah direncanakan.”

12. Apa saja manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dengan proyek-proyek tersebut?

“Manfaat ya positif mas. Kita mengajukan perbaikan jalan, kita mengajukan pembuatan resapan air kan itu sangat bermanfaat untuk masyarakat, karena jika hanya menggunakan swadaya masyarakat mungkin belum terlaksana tapi karena ada bantuan dari penggunaan dana desa bisa membantu masyarakat.”

13. Adakah sarana untuk mengontrol yang disediakan oleh pemerintah desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan?

“Ya untuk kontrol yang pemerintah desa biasanya ada pengawasnya kan kita biasanya terima material dan tenaga kerja, bukan uang fisik. Ya *karepe* pemerintah mungkin bener ya mas, keuangan terkontrol dan masyarakat

biar bisa ikut terlibat, pengangguran-pengangguran gitu ikut terlibat. Seperti swakelola dari masyarakat. Kalaupun ada kendala kita masyarakat bisa bertanya atau maju langsung ke kantor desa untuk menagih, tapi biasanya jarang sih mas seperti itu paling ya keterlambatan pengiriman material jika itu proyek fisik.”

14. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?

“Ada pengawasan lah, kita juga kontrol. Selama pelaksanaan juga ngecek. Kontrol terbaik ya tanggapan dari masyarakat sendiri karena masyarakat langsung melihat ketika pengerjaan dan pemeliharaan ya masyarakat sendiri. Evaluasi ya ada mas, biasanya kan kita ada pertemuan rutin di RT dan RW untuk evaluasi, tapi relatif tidak ada masalah ya mas karena kita kerjakan sendiri dan kita rawat sendiri, jadi evaluasi ya biasanya cuman himbauan teknis untuk perawatannya saja mas.”

15. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai pelaksanaan program dana desa?

“Yang namanya kritik dan saran ya ada, karena suatu pekerjaan untuk membuat semua warga senang itu jarang mas. Jadi ya wajar lah ada kritik dan saran lah mas, karena tanpa kritik dan saran kan tidak ada kontrol untuk kedepannya agar bisa lebih baik.”

16. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

“Biasanya kritik dan saran yang diterima untuk kontrol kedepannya. Jadi mungkin jika kurang tepat, kita perbaiki besok. Biasanya ditampung di RT/RW gitu, nanti keluhannya apa. Nanti untuk kita musyawarahkan di pedukuhan yang akan datang, nanti sebagai catatan untuk program selanjutnya karena ada kontrol dari kritik masyarakat nanti sikap kita bagaimana untuk menyikapi. Apa yang kita lakukan diharapkan benar-bener apa yang dikehendaki masyarakat agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat.”



LAMPIRAN GAMBAR



(Gambar 1: Tampak depan Kantor Desa Sinduharjo)



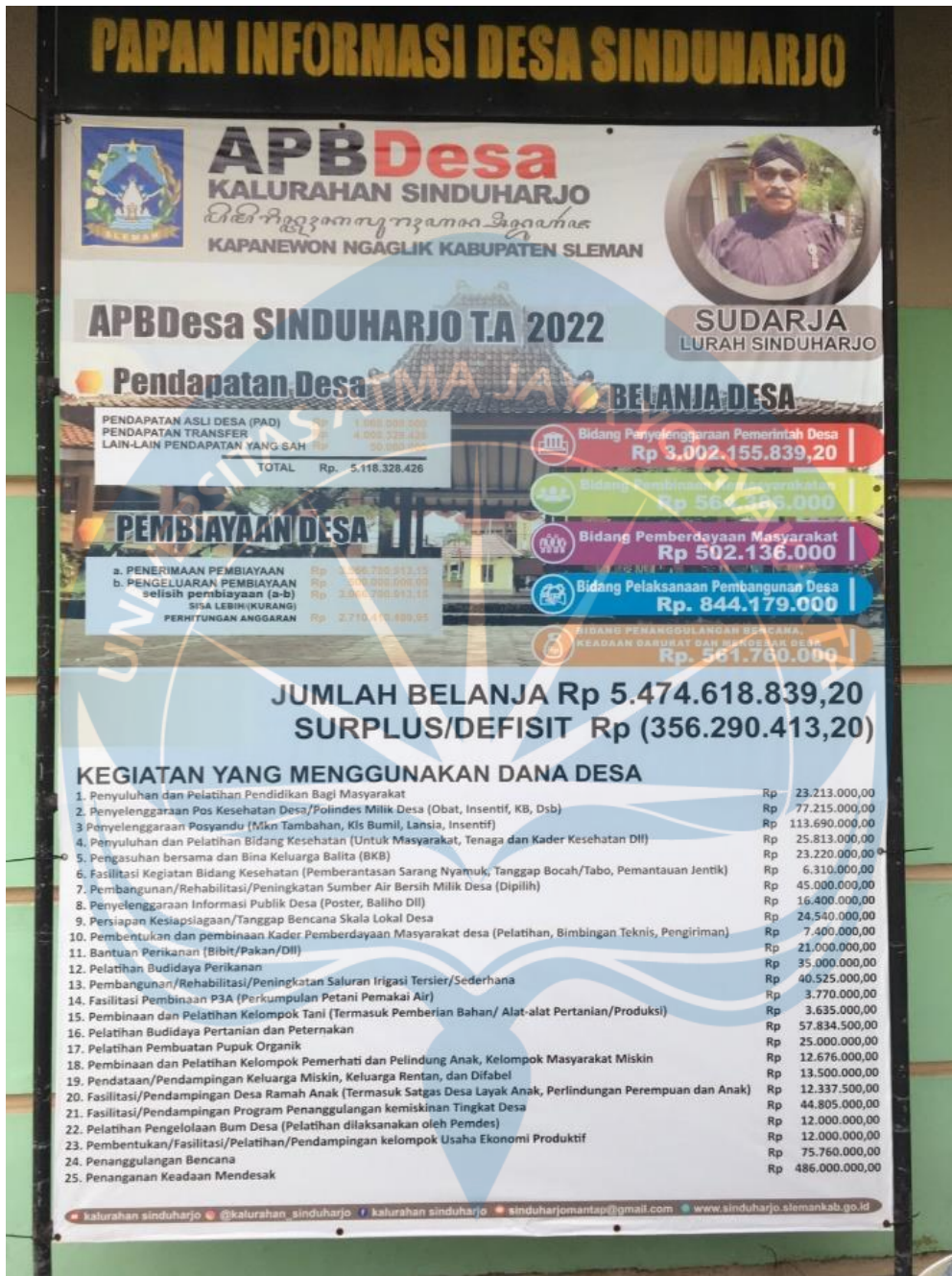
(Gambar 2: Ruangan Administrasi Kantor Desa Sinduharjo)



(Gambar 3: Susunan Pemerintahan di Desa Sinduharjo)



(Gambar 4: Bapak Faishal (kiri) sebagai sekretaris desa (carik) dan bapak Sudarja (kanan) sebagai kepala desa Sinduharjo)



(Gambar 5: Baliho untuk pelaporan keuangan desa di salah satu daerah di desa Sinduharjo)



(Gambar 6: Suasana di dalam area kantor desa Sinduharjo)



(Gambar 7: Baliho pelaporan APBDesa di kantor desa Sinduharjo)



(Gambar 8: Kepala Dukuh Ngabean Wetan bapak Budi didepan kantor pedukuhan)



(Gambar 9: Suasana di depan kantor pedukuhan Ngabean Kulon)

